

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT



4.1. Visi dan Misi

Jawa Barat adalah sebuah provinsi yang bisa menjanjikan kehidupan yang nyaman dan sejahtera untuk semua, jika pemerintah daerah dan masyarakatnya sepakat untuk secara optimal menjawab tantangan, menyelesaikan permasalahan, serta memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. Kebersamaan adalah sebuah kata kunci, sedangkan kepemimpinan adalah jawaban terhadap setiap tantangan. Sementara



tata kelola pemerintahan daerah yang baik adalah titik tolak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.

Dengan modal kebersamaan, kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diharapkan masyarakat akan lebih

mampu memanfaatkan segala potensi dan peluang yang tersedia. Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi, serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat 2013-2018 adalah :

***“ Masyarakat Kelautan dan Perikanan Jawa Barat
yang Maju dan Sejahtera ”***

Pernyataan visi tersebut, memiliki beberapa kata kunci yang menjadi unsur pendorong untuk meningkatkan kinerja organisasi serta menjadi pengikat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pembangunan kelautan dan perikanan.

MAJU berarti :

Sikap dan kondisi masyarakat kelautan dan perikanan yang produktif, berdaya saing, dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak, dan adaptif terhadap dinamika perubahan, namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal, dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

SEJAHTERA berarti :

Sikap dan kondisi masyarakat kelautan dan perikanan Jawa Barat yang secara lahir dan bathin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupannya

Pernyataan visi tersebut mengandung pemaknaan bahwa dalam selama periode Tahun 2017 – 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat akan berupaya untuk :

1. Mempercepat kualitas manajemen kelautan dan perikanan, sehingga dapat memberikan penguatan terhadap percepatan pembangunan ekonomi, fisik, sosial dan budaya di Jawa Barat.
2. Mengoptimalkan kinerja institusi dalam konteks pelayanan kelautan dan perikanan di Jawa Barat.

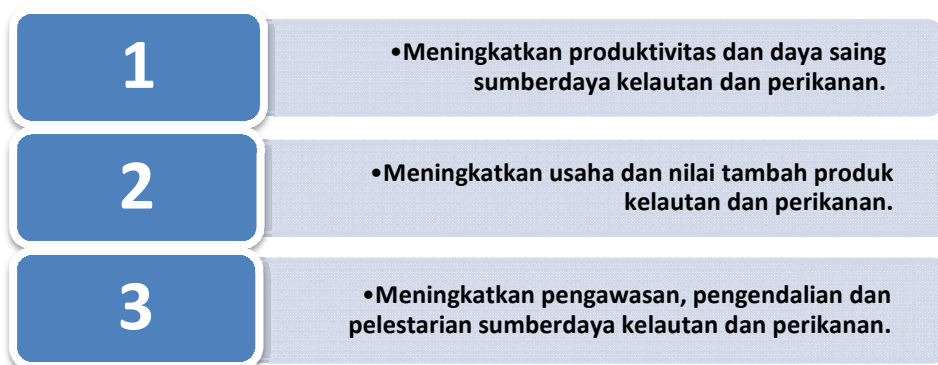
Untuk mewujudkan makna yang terkandung dalam visi sebagaimana telah disebutkan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat akan memposisikan diri sebagai :

1. Inovator dalam pengembangan teknologi kelautan dan perikanan;
2. Motivator dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan;
3. Fasilitator dalam pengembangan sarana dan prasarana untuk pengembangan aktivitas kelautan dan perikanan;
4. Mediator dalam penyediaan permodalan dan pengembangan usaha;

5. Dinamisor peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sekaligus mengantisipasi perubahan perkembangan situasi dan kondisi regional, nasional, lingkungan strategis serta kecenderungan global dengan perubahan yang begitu cepat.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki ditetapkan misi yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan perikanan Jawa Barat, misi tersebut adalah sebagai berikut.

Gambar 4.1
Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat 2017-2018



4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, serta berdasarkanidentifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kuantitas produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berbasis IPTEK	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan Jawa Barat	Prosentase Peningkatan Produksi perikanan						
			Produksi perikanan budidaya	%	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
			Produksi perikanan tangkap	%	0.17	1.58	1.58	1.58	1.58
			Produksi Olahan	%	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
			Produksi Non Konsumsi	%	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			Produksi Garam	%	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		2. Meningkatnya kesempatan berusaha dan penyediaan lapangan kerja sektor kelautan dan perikanan	Prosentase Peningkatan RTP Perikanan						
			RTP Perikanan Budidaya	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			RTP Perikanan Tangkap	%	1.50	1.49	1.49	1.49	1.49
			RTP Pengolah Hasil Perikanan	%	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50
		3. Meningkatnya peran Jawa Barat sebagai sentra benih nasional	Prosentase Permintaan Benih Ikan Nila	%	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
			Prosentase Permintaan Benih Ikan Patin	%	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
			Prosentase Permintaan Benih Ikan Lele	%	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
			Prosentase Permintaan Benih Ikan Gurame	%	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
		4. Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	NTP Sub Sektor Perikanan	Indeks	111.12	111.68	112.24	112.8	113.36
2	Meningkatkan mutu/kualitas hasil perikanan	1. Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan	Prosentase Jumlah Produksi Perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan	%	85.00	86.00	88.00	89.00	90.00
			Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan	Kasus	0	0	0	0	0
		2. Meningkatnya penguasaan pasar (<i>market share</i>) produk perikanan di pasar luar negeri	Prosentase peningkatan jumlah ekspor hasil perikanan	%	3.00	3.10	3.20	3.30	3.50
			Prosentase peningkatan Nilai ekspor hasil perikanan	%	3.00	3.10	3.20	3.30	3.50
		3. Meningkatnya ketersediaan ikan untuk di konsumsi	Ketersediaan ikan untuk di konsumsi	%	2.00	2.00	2.50	2.50	2.50
3	Meningkatkan kualitas daya dukung dan daya tampung sumberdaya kelautan dan perikanan	1. Meningkatnya pengelolaan dan pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengawasan dan pengendalian SDKP	Prosentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan (<i>illegal, Unreported and Unregulated fishing</i>)	%	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00



Tabel 4.2
Review Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	
			2017	2018				2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perikanan dan kelautan yang berdaya saing dan berbasis IPTEK	Peningkatan Produksi Perikanan	persen	5	5	Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan Jawa Barat	peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	5	5
						peningkatan Produksi Non Konsumsi	persen	2	2
						Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	persen	1.58	1.58
	Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan nasional	persen	20	20	Meningkatnya peran Jawa Barat sebagai sentra benih ikan nasional	Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan nila nasional	persen	50	50
						Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan mas nasional	persen	50	50
						Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan lele nasional	persen	10	10
						Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan patin nasional	persen	10	10
Meningkatkan nilai tambah dan mutu hasil perikanan	Persentase jumlah produksi kelautan dan perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan	persen	89	90	Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan	Persentase jumlah produksi kelautan dan perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan	persen	89	90
					Meningkatnya ketersediaan aneka produk olahan hasil perikanan	Peningkatan Produksi Olahan	persen	10	10
	Konsumsi Ikan	Kh/Kap/Thn	26.85	27.66	Meningkatnya Konsumsi Ikan di Jawa Barat	Konsumsi Ikan	Kh/Kap/Thn	26.85	27.66
	Peningkatan Produksi Garam	persen	5	5	Meningkatnya Ketersediaan garam	Peningkatan Produksi Garam	persen	5	5
Meningkatkan kualitas daya dukung dan daya tampung sumberdaya kelautan dan perikanan	Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan (IUU fishing)	persen	25	30	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian SDKP	Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan (IUU fishing)	persen	25	30
						penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu	persen	75	80

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Jumlah pemanfaatan dan Pengelolaan kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Kawasan	1	1	Meningkatnya pengelolaan dan pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah pemanfaatan dan Pengelolaan kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Kawasan	1	1
	Luas Kawasan Rehabilitasi dan Revitalisasi Ekosistem Perairan Umum Daratan	Ha	280	280		Luas Kawasan Rehabilitasi dan Revitalisasi Ekosistem Perairan Umum Daratan	Ha	280	280
						Jumlah Penebaran benih Ikan di Perairan Umum	Ekor	12,000,000	14,000,000
	Jumlah Plasma Nutfah yang dilestarikan	Jenis	4	5	Terjaganya Kelestarian Plasma Nutfah	Jumlah Plasma Nutfah yang dilestarikan	Jenis	4	5

4.3. Strategi dan Kebijakan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman



eksternal. Pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Barat akan dipengaruhi faktor sumber daya, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya lainnya, termasuk sarana dan prasarana pendukung.

Pola pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan juga akan di pengaruhi oleh faktor politis berupa arahan kebijakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Faktor arahan kebijakan tersebut akan menentukan bagaimana pola, bentuk, dan mekanisme dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, tingkat volume produksi/pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, ketersediaan dukungan prasarana dan sarana pendukung

kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dan berbagai aspek lainnya yang terkait.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, sebagai berikut :

1. Kemandirian Pangan
2. Daya Saing
3. Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Rincian tujuan, sasaran, strategi ,dan kebijakan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Masyarakat Kelautan dan perikanan Jawa Barat Yang Maju dan Sejahtera			
KEMANDIRIAN PANGAN			
Misi 1 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing sumberdaya kelautan dan perikanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kuantitas produk kelautan dan perikanan, yang berdaya saing dan berbasis iptek;	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan Jawa Barat2. Meningkatnya peran Jawa Barat sebagai sentra benih nasional3. Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	<ol style="list-style-type: none">1. Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam pengelolaan Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan2. Standarisasi dan modernisasi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan3. Penyediaan dan distribusi induk dan benih unggul (terutama komoditas Nila, Mas, Lele, Patin dan Gurame)4. Berperan dalam pusat pertumbuhan baru (growth center) Palabuhanratu, Rancabuaya, dan Pangandaran berbasis Kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelautan dan perikanan2. Optimalisasi Pengembangan Perikanan Budidaya3. Peningkatan Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)4. Penataan Perikanan Tangkap
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jawa Barat	Meningkatnya kinerja sumberdaya kelautan perikanan Jawa Barat	Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam pengelolaan Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)



DAYA SAING			
Misi 2: Meningkatkan usaha dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan nilai tambah dan mutu hasil perikanan;	1. Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan 2. Meningkatnya ketersediaan aneka produk olahan hasil perikanan 3. Meningkatnya Konsumsi Ikan di Jawa Barat 4. Meningkatnya Ketersediaan garam	1. Mengembangkan dan meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (quality assurance & food safety); 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap investasi dan permodalan 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perikanan 4. Standarisasi dan modernisasi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan 5. Meningkatkan kerjasama daerah melalui kegiatan tematik kewilayahan	1. Peningkatan Mutu, Peningkatan Nilai Tambah Produk dan Pemasaran Hasil Perikanan 2. Peningkatan Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
KELESTARIAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Misi 3: Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas daya dukung dan daya tampung sumberdaya kelautan dan perikanan	1. Meningkatnya pengelolaan dan pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan 2. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian SDKP 3. Terjaganya kelestarian plasma nutfah	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian , pengembangan dan penguatan kelembagaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2. Pemetaan potensi ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 3. Rehabilitasi ekosistem terumbu karang, mangrove dan vegetasi pantai 4. Pengaturan alokasi kegiatan-kegiatan dalam ruang serta pemberlakuan manajemen pengawasan terhadap aktivitas kegiatan dengan sektor lain 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong terbangunnya konsistensi dan komitmen dalam penegakan hukum.	1. Penataan Perikanan Tangkap 2. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan akan dilaksanakan melalui peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan. Pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengembangan dan pengelolaan kawasan

pesisir, revitalisasi ekosistem perairan umum, pengembangan teknologi kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, serta peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan. Selain itu, pola kebijakan yang dibangun sejatinya juga diarahkan untuk mendorong peran yang lebih besar kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai operator pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan. Semua kebijakan tersebut, diharapkan mampu memberikan arah dan landasan yang jelas bagi proses pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Jawa Barat.

4.3.1 Kebijakan Makro Pembangunan Perikanan dan Kelautan

Kebijakan makro pembangunan kelautan dan perikanan didasari oleh visi, misi dan potensi daerah. Dalam konteks tersebut, sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di wilayah Jawa Barat sesungguhnya merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang seharusnya dikelola dan didayagunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pemanfaatannya. Itulah sebabnya kemudian pengelolaan sektor kelautan dan perikanan juga diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur dan merata, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam konstelasi pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan ditujukan pada lima aspek untuk mendukung proses pencapaian beberapa hal, yaitu :

1. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.
2. Pengentasan kemiskinan.
3. Peningkatan konsumsi ikan lokal.
4. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan.

5. Pemersatu bangsa

Dengan demikian keberadaan sumber daya kelautan dan perikanan harus dapat didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, karena esensi pembangunan tersebut sesungguhnya merupakan manifestasi dari amanat Undang-undang Dasar 1945, yakni ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat sekaligus menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

4.3.2 Landasan Pendekatan Pembangunan Kelautan dan perikanan

Guna mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta meningkatkan keberlanjutan pemanfaatannya, maka perlu didukung oleh upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dilandasi pendekatan pembangunan kelautan dan perikanan. Adapun pendekatan pembangunan yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Keterpaduan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan perikanan

Pendekatan keterpaduan dibutuhkan dalam rangka mewujudkan adanya keselarasan, kesinergian, serta keseimbangan dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya kelautan dan perikanan. Adapun aspek keterpaduan ini mengandung dimensi :

- 1) Keterpaduan struktural antar hirarki kebijakan/rencana pembangunan terkait

Pelaksanaan pembangunan wilayah dilakukan dengan didasarkan pada kebijakan/rencana pembangunan, yang umumnya disusun secara terstruktur dan hirarkis mulai dari kebijakan/rencana pembangunan di tingkat nasional, provinsi,

kabupaten/kota, hingga kawasan. Agar proses pembangunan dapat berlangsung secara sinergis dan serasi, akan dibutuhkan adanya keterpaduan diantara berbagai hirarkri kebijakan/rencana pembangunan tersebut. Dengan demikian, pendekatan keterpaduan kebijakan dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Barat mengandung arti bahwa rencana pembangunan kelautan dan perikanan harus terpadu dengan kebijakan/rencana pembangunan terkait di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan dan masih berlaku sebagai acuan/pedoman dasar pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di provinsi Jawa Barat.

2) Keterpaduan Antar Sektor

Dalam ruang wilayah, baik di wilayah daratan maupun laut terkandung berbagai kekayaan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Dengan mempertimbangkan bahwa dalam akses untuk memanfaatkan sumber daya tersebut bersifat *open access*, maka sangatlah tinggi potensi terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia. Konflik kepentingan dapat terjadi antar sektoral, antar pemerintah daerah, antar kelompok, maupun antar individu. Konflik ini tidak hanya berlangsung dalam konteks "perebutan" lahan atau sumber daya, tetapi juga konflik antar aktivitas yang berlangsung dengan adanya fakta bahwa suatu aktivitas pemanfaatan ruang dapat berpotensi menimbulkan kerugian terhadap aktivitas pemanfaatan ruang lainnya. Keterpaduan sektoral diterjemahkan dalam wujud pengaturan alokasi kegiatan-kegiatan dalam ruang serta pemberlakuan manajemen pengawasan terhadap aktivitas kegiatan, sedemikian rupa sehingga dapat meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Keterpaduan antar sektor kegiatan ini mutlak

dibutuhkan mengingat fakta bahwa dalam suatu ruang wilayah dapat mengandung lebih dari satu potensi pemanfaatan sektoral. Sebagai contoh di wilayah perairan pantai yang memiliki potensi bagi pengembangan budidaya perikanan tambak, penangkapan, fungsi lindung (kawasan hutan bakau dan terubum karang), pariwisata bahari, pertambangan migas, dan lain sebagainya. Tanpa ada keterpaduan, maka yang terjadi adalah konflik kepentingan sektoral dalam pemanfaatan ruang wilayah tersebut. Tanpa ada keterpaduan, sektor perikanan akan memiliki posisi yang lemah disebabkan oleh pengaruh (dampak) yang ditimbulkan oleh aktivitas kegiatan di luar sektor perikanan yang bersifat negatif terhadap keberlangsungan kegiatan perikanan atau sumber daya perikanan yang ada.

3) Keterpaduan Antar Wilayah Administratif

Keterpaduan pengelolaan sumber daya perikanan secara lintas administratif dibutuhkan sehubungan dengan sifat sumber daya ikan maupun sifat massa air dimana ikan hidup. Sebagian besar sumber daya ikan (khususnya yang ada di perairan umum dan laut) bukanlah sumber daya yang bersifat menetap, melainkan dapat bermigrasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pola migrasi ini kadang kala terkait dengan pemilihan wilayah untuk memijah, bertelur, dan berkembang biak. Sementara sifat massa air adalah selalu bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam jarak yang tidak terbatas (hanya dibatasi oleh aturan topografi wilayah). Dalam pergerakannya tersebut, massa air akan membawa berbagai zat dan sedimen yang terlarut di dalamnya. Sifat mobilitas sumber daya ikan beserta pergerakan massa air ini dapat bersifat lokal maupun luas, termasuk bersifat lintas administrasi.

b. Pendekatan Sistem Perwilayahan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan perikanan

Pendekatan sistem wilayah didasarkan pada suatu pandangan bahwa keseluruhan unsur-unsur pembentuk ruang wilayah yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya binaan/buatan saling berinteraksi dan mempengaruhi dalam suatu sistem wilayah. Pendekatan wilayah juga mengandung arti bahwa ruang wilayah yang terdiri dari ruang daratan, perairan dan udara yang dalam kerangka pengelolaan terbagi menjadi wilayah-wilayah administrasi. Kesemuanya itu, pada dasarnya merupakan kesatuan saling memberikan pengaruh secara lintas wujud dan administrasi.

4.3.3 Kebijakan Operasional

Kebijakan Operasional yang ditetapkan dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelautan dan perikanan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dititikberatkan pada peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan perairan umum melalui upaya *restocking*, peningkatan nilai usaha tani sawah dengan menggalakkan usaha mina-padi dengan komoditas ikan dan udang galah serta pengembangan ikan hias. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1) Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum

Jawa Barat memiliki perairan umum yang sangat potensial yaitu sungai, danau, waduk, rawa dan talanca, yang apabila dikelola dengan baik akan mendatangkan kemanfaatan yang sangat besar bagi masyarakat. Kegiatan penebaran benih ikan di PU terbagi menjadi 2 kegiatan yaitu : (1)Restocking di perairan

umum dengan komoditas spesifik lokalita dan produk primer seperti ikan tambakan, mola, nilem, tawes, nila, dan grasscarp, (2) Stocking ikan di perairan umum dengan komoditas ikan introduksi, seperti nila, mas, patin, udang dan lain-lain. Hal tersebut bertujuan antara lain :

- a. Pemulihan dan Pelestarian Sumberdaya Perikanan di Perairan Umum
- b. Memberdayakan ekonomi masyarakat terutama yang tidak mempunyai lahan untuk budidaya sehingga memperoleh pendapatan dari hasil tangkapan di perairan umum;
- c. Penyediaan bahan pangan bergizi yang mudah dan murah;
- d. Pengendalian gulma air;
- e. Pengendalian nyamuk malaria.

2) Mina-Padi

Kegiatan mina-padi bertujuan untuk meningkatkan nilai usaha petani dari semula tidak termasuk skala usaha, maka dengan sentuhan teknologi budidaya ikan/udang galah akan diperoleh tambahan penghasilan.

3) Pengembangan Ikan Hias

Kegiatan pengembangan ikan hias untuk mengantisipasi masyarakat perkotaan yang berkaitan dengan keterbatasan lahan dan air, yang diarahkan untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat dengan sasaran komoditas yang memiliki nilai jual tinggi untuk di ekspor dan dipasaran lokal. Upaya untuk mendorong perkembangannya akan dilakukan beberapa kegiatan melalui pameran dan festival khusus ikan hias. Fokus komoditas yang akan dikembangkan adalah ikan koi, komet dan koki.

2. Peningkatan Mutu, Peningkatan Nilai Tambah Produk dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan pasca panen dan pemasaran merupakan salah satu mata rantai yang cukup penting dalam kegiatan usaha kelautan dan perikanan. Karena keberhasilan dalam produksi tanpa didukung dengan kegiatan di hilir (pasca panen) kurang berdampak secara optimal. Oleh karena itu beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan prinsip "*good handling practies*" pada saat penangkapan/panen dan pendaratan/sortir.
- b. Peningkatan sistem informasi pasar dan PUSJUI.
- c. Optimalisasi Pelelangan Ikan (Optilanpi), Optimalisasi Pengolahan Ikan (Optihankan) dan Optimalisasi Pemasaran Ikan (Optisarkan) dalam rangka menumbuhkembangkan industri pengolahan dan pemasaran ikan skala rumah tangga
- d. Pembangunan dan pengembangan depo pasar ikan air tawar dan pasar ikan higienis yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- e. Mengembangkan dan memperkuat sistem informasi pasar yang terkait dengan pasar lokal, regional dan internasional.
- f. Memperlancar dan mengembangkan ekspor dengan mengacu pada persyaratan standar internasional serta meningkatkan keikutsertaan dalam aktivitas promosi dan pameran.
- g. Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) pada saat penangkapan/panen, pendaratan/sortir dan pemasaran.
- h. Pengembangan usaha waralaba yang dikaitkan dengan kegiatan distribusi sistem rantai dingin sejak saat penangkapan/panen, pendaratan/sortir dan pemasaran termasuk peningkatan armada pemasaran keliling dengan menggunakan *coolbox*, serta pembangunan *cold storage* di sentra pemasaran dan pengolahan.

3. Optimalisasi Pengembangan Perikanan Budidaya

Kegiatan kelautan dan perikanan berpeluang cukup besar, khususnya pada sektor perikanan budidaya, baik budidaya air tawar, payau maupun laut. Melalui penerapan teknologi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta pengembangan diversifikasi komoditas budidaya perikanan memiliki nilai ekonomis tinggi. Potensi sumberdaya perikanan budidaya secara geografis berada di wilayah pantai utara, tengah dan selatan Jawa Barat. Budidaya air payau/tambak terutama dengan komoditas unggulan udang memiliki potensi yang baik untuk memacu pertumbuhan ekonomi karena memiliki pangsa pasar yang luas. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi usaha yang disebabkan seringnya terjadi serangan penyakit dan penurunan daya dukung lingkungan khususnya di wilayah Pantura. Sementara itu di wilayah Pansela potensinya cukup besar dan tingkat pemanfaatannya masih sangat kecil. Untuk mengatasi keadaan tersebut perlu dilakukan revitalisasi budidaya tambak di Pantura yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha serta dengan akselerasi pengembangan budidaya laut di Pansela. Langkah operasional perikanan budidaya yang cukup strategis adalah dengan dilakukannya pengembangan perikanan di Pantai Utara, Jawa Barat Tengah dan Muara Pantai Selatan. Adapun langkah yang dimaksud, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Membangkitkan usaha budidaya ikan dan udang di tambak-tambak yang ada di Pantura;
- b. Peningkatan pengembangan budidaya ikan air tawar;
- c. Menyediakan induk dan benih ikan/udang yang berkualitas;
- d. Menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha;
- e. Mendorong penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan untuk mengatasi kualitas perairan yang semakin memburuk;
- f. Perbaikan lingkungan, antara lain :

- Rehabilitasi dan penanaman mangrove pada jalur hijau, tanah timbul, dan sempadan saluran tambak;
 - Pengendalian pencemaran akibat limbah pertanian, industri, minyak dan aktivitas nelayan/pelayaran serta limbah organik rumah tangga.
- g. Diversifikasi usaha dengan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi;
- h. Penerapan teknologi *biosecurity*;
- i. Penyediaan benur tahan penyakit;
- j. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- k. Penataan pertambakan, khususnya saluran tambak berkesisteman;
- l. Penerapan Sistem Produksi dan Jaminan Mutu Budidaya melalui standarisasi, sertifikasi, akreditasi dan kajian paket teknologi budidaya;
- m. Monitoring budidaya berkelanjutan, dan revitalisasi budidaya air payau di Pantura;
- n. Akselerasi Pengembangan Budidaya di Pansela;
- o. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- p. Meningkatkan kesehatan ikan melalui pengendalian HPI, OIKB, dan meminimalisir resiko;
- q. Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), melalui :
- KUR; KKPE; PNPM;
 - Bantuan Gubernur, Subsidi Benih, Bantuan dari Sumber-Sumber Lain.

4. Peningkatan Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Peran UPTD dalam pembangunan kelautan dan perikanan sangat strategis dan termasuk ujung tombak dalam menentukan keberhasilannya. Porsi dan peranan yang lebih besar akan diberikan kepada UPTD/Balai lingkup Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan. Secara bertahap peningkatan peran tersebut diarahkan pada pencapaian profesionalisme dan

kemandirian termasuk kontribusi nyata dari UPTD perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan hasil perikanan terhadap pemberdayaan masyarakat. Secara umum peran UPTD diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dalam penerapan teknologi kepada masyarakat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, diantaranya penyediaan benih dan induk induk ikan yang berkualitas, baik untuk kebutuhan pembesaran maupun untuk penebaran di perairan umum disertai peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait di Kabupaten/Kota.

Teknologi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan pada umumnya belum optimal, walaupun demikian pada beberapa kegiatan usaha telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Teknologi penangkapan ikan khususnya di wilayah pantai utara sudah maju dengan fishing ground yang lebih jauh sedangkan di pantai selatan masih rendah. Teknologi budidaya air tawar dan air payau telah relatif maju sedangkan teknologi budidaya laut relatif masih rendah.

Jawa Barat memiliki sumber informasi teknologi sebagai pendukung dalam rangka mendukung pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki UPTD tingkat provinsi, UPTD tingkat kabupaten/kota maupun adanya UPT Pusat dan Perguruan Tinggi unggulan. Adapun UPT dan UPTD yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) UPTD Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Barat, meliputi :
 - a. Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Nila dan Mas, Wanayasa Kabupaten Purwakarta
 - b. Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Patin dan Lele Cijenkol Kabupaten Subang
 - c. Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Gurame dan Nilem Singaparna;

- d. Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan Pangandaran;
- e. Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Utara Sungaibuntu;
- f. Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan Cilauteureun;
- g. Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara Muara Ciasem;
- h. Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cirebon;
- i. Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias Ciherang;
- j. Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Pangumbahan; dan
- k. Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Cirebon.

2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, meliputi :

- a. Balai Riset Budidaya Air Tawar di Bogor
- b. Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) di Sukabumi
- c. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Palabuhanratu Sukabumi
- d. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Kejawan Cirebon
- e. Balai Diklat Aparatur Departemen Kelautan dan Perikanan di Sukamandi Subang
- f. Loka Riset Pemuliaan dan Teknologi Budidaya Perikanan Air Tawar Sukamandi
- g. Loka Riset Budidaya Ikan Hias Depok
- h. Loka Riset Pemacuan Stock di Jatiluhur
- i. Balai Besar Pengkajian Teknologi Terapan (LIPI) Subang

- 3) Perguruan Tinggi Unggulan yang dipandang mampu memberikan kontribusi maksimal dalam pengembangan kelautan dan perikanan di Jawa Barat :
- a. Institut Pertanian Bogor
 - b. Institut Teknologi Bandung
 - c. Universitas Padjajaran
 - d. Universitas Indonesia

5. Penataan Perikanan Tangkap

Usaha penangkapan ikan di perairan Jawa Barat terbagi 3 wilayah, yaitu wilayah pantai utara, tengah (perairan umum) dan pantai selatan. Di wilayah pantai utara telah menunjukkan gejala tangkap lebih, sehingga perlu segera dilakukan rasionalisasi, baik menyangkut penyesuaian jumlah armada, pengalihan atau revitalisasi usaha nelayan maupun upaya perbaikan lingkungan. Di wilayah tengah usaha perikanan tangkap dilakukan pada perairan umum, seperti waduk, danau, situ, sungai, bekas galian. Di wilayah selatan, potensi perikanan tangkap belum dimanfaatkan secara optimal dan masih berpeluang cukup besar sehingga perlu dilakukan akselerasi usaha perikanan tangkap. Langkah strategis dilakukan dengan kegiatan terobosan melalui :

- a. Penerapan prinsip "*Responsible Fisheries*" : JTB/MSY
- b. Peningkatan produksi penangkapan dengan pola kemitraan
- c. Pengembangan sarana perikanan tangkap
- d. Relokasi usaha nelayan dari daerah padat tangkap ke daerah potensial
- e. Rasionalisasi usaha perikanan tangkap di Pantura
- f. Akselerasi pengembangan perikanan tangkap di Pansela
- g. Rehabilitasi dan konservasi ekosistem sumberdaya kelautan dan perikanan

- h. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan melalui pelatihan, studi banding dan magang.
- i. Memfasilitasi penguatan modal melalui penumbuhan Lembaga Ekonomi Mikro (LEM) dengan dukungan lembaga Perbankan dalam rangka pengembangan bisnis kelautan;
- j. Meningkatkan pengawasan SDKP melalui pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
- k. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur melalui peningkatan sarana dan prasarana PPI, PPP, PPN, dan UPTD Tangkap yang telah ada agar dapat berfungsi dan mencapai standar pelayanan minimal
- l. Alih usaha nelayan melalui kegiatan budidaya dan pengolahan hasil
- m. Pengembangan penangkapan ikan dengan penerapan sistem penginderaan jarak jauh dan alat bantu penangkapan.
- n. Mendorong peningkatan status PPN Pelabuhan Ratu menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), sehingga dapat menarik kapal-kapal dari luar Jawa Barat untuk berlabuh dengan memanfaatkan ABK setempat;
- o. Penerapan CCRF dan peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

6. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

Dalam rangka menciptakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berkelanjutan, maka beberapa langkah yang akan dilakukan, adalah sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir
- b. Penataan ruang pesisir dan laut
- c. Pemetaan potensi ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- d. Pengelolaan dan pendayagunaan wilayah pesisir dan laut
- e. Rehabilitasi dan pengkayaan ekosistem pesisir dan laut

- f. Pengendalian pencemaran pesisir dan laut
- g. Mitigasi bencana
- h. Pengelolaan kawasan konservasi laut
- i. *Clean Belt*
- j. Pencanaan kawasan konservasi perairan

4.4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicators* (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. IKU Dinas Kelautan dan perikanan dapat digambarkan pada Tabel 4.4.

**TABEL 4.4. INDIKATATOR KINERJA UTAMA 2017-2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan dan kelautan Jawa Barat	Prosentase Peningkatan Produksi perikanan a. Produksi perikanan budidaya b. Produksi perikanan tangkap c. Produksi Non Konsumsi	Formulasi $A = \frac{(X_{(n)} - X_{(n-1)})}{X_{(n-1)}} \times 100\%$ Keterangan : A = Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan X_(n) = Jumlah produksi perikanan Jawa Barat pada tahun ke n X_(n-1) = Jumlah produksi perikanan Jawa Barat pada tahun ke n-1 Jumlah produksi perikanan Jawa Barat merupakan resultante dari Jumlah Produksi Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), dan UPTD Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Barat
2	Meningkatnya peran Jawa Barat sebagai sentra benih nasional	Prosentase Kontribusi pemenuhan benih ikan Mas, Nila, Patin, dan Lele	Formulasi $A = \frac{Y_{(n)}}{X_{(n)}} \times 100\%$ Keterangan : A = Kontribusi pemenuhan benih ikan X_(n) = Jumlah Kebutuhan Benih Nasional tahun ke n Y_(n) = Jumlah Produksi Benih Ikan di Jawa Barat pada tahun ke n	BPPSIPL Cijengkol, BPPSINM Wanayasa	Bidang Perikanan Budidaya, BPPSIPL Cijengkol, BPPSINM Wanayasa



1	2	3	4	5	6
4.	Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan	Prosentase Jumlah Produksi Perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan	<p>Standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan :</p> <p>a. Tidak mengandung formalin</p> <p>b. Tidak mengandung residu</p> <ul style="list-style-type: none"> - A1 = Stilbenes :Dietly stilbestrol/DES) - A3 = Steroid : Methyltestosterone - A6 = Antibiotik : CAP, AMOZ, AOZ, SEM, AHD, Dimetridazole - B1 = Antibacterial : Tetracycline, Oxytetracycline, Chortetracycline, Doxycycline, Sulfadiazine, Enrofloxacin) - B2a = Anthelminthic : Ivermectin, Emamectin - B3a = Pestisida Organoclorin - B3c = Logam Berat : Pb, Hg, Cd - B3d = Mycotoxin : Aflatoxin - B3e = Bahan celup : Malachite Green/Euchomalachite Green dan Crystal violet 	Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang P2HP dan Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cirebon	Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang P2HP dan Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cirebon
			<p>Formulasi</p> $A = \frac{X}{Y} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>A = Prosentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan</p> <p>X = Jumlah sampel yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan</p> <p>Y = Jumlah sampel yang diambil</p> <p>Sampel (diambil secara acak) berasal dari hasil uji formalin yang dilakukan ke pasar, UPI dan TPI Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam rangka monitoring bahan berbahaya pada produk perikanan dan monitoring residu terhadap komoditi udang dan ikan yang dilakukan ke pembudidaya di kabupaten/kota di Jawa Barat</p>		
5.	Meningkatnya Ketersediaan Garam di Jawa Barat	Prosentase Peningkatan Produksi garam	<p>Formulasi</p> $A = \frac{(X_{(n)} - X_{(n-1)})}{X_{(n-1)}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>A = Prosentase Peningkatan Produksi Garam</p> <p>X_(n) = Jumlah produksi garam pada tahun ke n</p> <p>X_(n-1) = Jumlah produksi garam pada tahun ke n-1</p> <p>Jumlah produksi garam Jawa Barat merupakan resultante dari Jumlah Produksi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cirebon</p>	Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Karawang	Bidang Kelautan



1	2	3	4	5	6
6.	Meningkatnya ketersediaan aneka produk olahan hasil perikanan	Prosentase Peningkatan Produksi olahan	<p>Formulasi</p> $A = \frac{(X_{(n)} - X_{(n-1)})}{X_{(n-1)}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>A = Prosentase Peningkatan Produksi Olahan</p> <p>X_(n) = Jumlah produksi olahan Jawa Barat pada tahun ke n</p> <p>X_(n-1) = Jumlah produksi olahan Jawa Barat pada tahun ke n-1</p> <p>Jumlah produksi perikanan Jawa Barat merupakan resultante dari Jumlah Produksi Kabupaten/Kota se-Jawa Barat</p>	Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)
7.	Meningkatnya konsumsi ikan di Jawa Barat	Prosentase peningkatan Konsumsi Ikan	Perhitungan Konsumsi Ikan didapat dari Survey Susenas dengan sasaran Rumah tangga yang dilaksanakan oleh BPS dan menghasilkan raw data konsumsi ikan per rumah tangga , yang kemudian dihitung melalui aplikasi perhitungan konsumsi ikan oleh bidang pengembangan usaha	BPS Provinsi Jawa Barat dan Bidang Pengembangan Usaha	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)
8.	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian SDKP	Prosentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran sektor perikanan dan kelautan (<i>Illegal, Unreported and Unregulated fishing</i>)	<p>Formulasi</p> $A = \frac{(X_{(n-1)} - X_{(n)})}{X_{(n)}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>A = Prosentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran sektor perikanan dan kelautan (<i>Illegal, Unreported and Unregulated fishing</i>)</p> <p>X_(n) = proporsi jumlah kasus pelanggaran pada tahun ke n</p> <p>X_(n-1) = proporsi jumlah kasus pelanggaran pada tahun ke n-1</p> <p>Kasus pelanggaran perizinan, kasus penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, kasus pengeboman, kasus peracunan, dan kasus <i>IUU fishing</i> lainnya di Jawa Barat</p>	Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Bidang Kelautan DKP Jawa Barat	Bidang Kelautan
		Prosentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu	<p>Formulasi</p> $A = \frac{(X_{(n-1)} - X_{(n)})}{X_{(n)}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>A = Prosentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu</p> <p>X_(n) = Jumlah penyelesaian tindak pidana pada tahun ke n</p> <p>X_(n-1) = Jumlah penyelesaian tindak pidana pada tahun ke n-1</p> <p>Kasus pelanggaran perizinan, kasus penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, kasus pengeboman, kasus peracunan, dan kasus <i>IUU fishing</i> lainnya di Jawa Barat</p>	Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Bidang Kelautan DKP Jawa Barat	Bidang Kelautan



1	2	3	4	5	6
9.	Meningkatnya pengelolaan dan pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan	Luas Kawasan Rehabilitasi dan Revitalisasi Ekosistem Pesisir, Laut. PPK dan Perairan Umum	Luas Kawasan Rehabilitasi dan revitalisasi Ekosistem Pesisir, Laut. PPK dan Perairan Umum dihitung dari pelaksanaan Rehabilitasi dan revitalisasi Ekosistem Pesisir, Laut. PPK dan Perairan Umum secara kumulatif	Bidang Kelautan, BPKSDKPWU Cirebon, BPKSDKPWS Pangumbahan, BPPPUIH Ciherang	Bidang Kelautan, BPKSDKPWU Cirebon, BPKSDKPWS Pangumbahan, BPPPUIH Ciherang
		Luas Kawasan Rehabilitasi dan Revitalisasi Ekosistem Perairan Umum	Luas Kawasan Rehabilitasi dan Revitalisasi Ekosistem Perairan Umum yang dilaksanakan pada Tahun n di Jawa Barat	Bidang Kelautan, BPPPUIH Ciherang	Bidang Kelautan, BPPPUIH Ciherang
		Jumlah Benih Ikan Endemik yang Ditebar di Perairan Umum (PU)	Kumulatif jumlah benih ikan endemik yang ditebar selama Tahun ke n	Bidang Kelautan, BPPPUIH Ciherang	Bidang Kelautan, BPPPUIH Ciherang
10.	Terjaganya Kelestarian Plasma Nutfah	Jumlah Plasma Nutfah yang dilestarikan	Pemuliaan Ikan	BPPSIPL Cijengkol, BPPSINM Wanayasa, BPPSIGN Singaparna	BPPSIPL Cijengkol, BPPSINM Wanayasa, BPPSIGN Singaparna